



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI V DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
(5 MARET SAMPAI DENGAN 13 MEI 2024)**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna tanggal 6 Februari 2024 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 4 April 2024, berjumlah 20 (dua puluh) hari kerja atau 31 (tiga puluh satu) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 5 April sampai dengan 13 Mei 2024, berjumlah 18 (delapan belas) hari kerja atau 38 (tiga puluh delapan) hari kalender.

Kegiatan Komisi V DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 difokuskan pada kegiatan Legislasi dan Pengawasan, terdiri dari rapat-rapat di komisi, melakukan kunjungan kerja spesifik dan kunjungan kerja reses Masa Persidangan IV tahun Sidang 2023-2024 untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian Komisi V DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

FUNGSI LEGISLASI

Pada masa sidang ini Komisi V melakukan Rapat untuk mendengarkan masukan dari BKD, para pakar, dan praktisi serta Asosiasi mengenai RUU perubahan kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Selanjutnya Komisi V juga melakukan Rapat Intern untuk mengambil keputusan internal di tingkat Komisi agar draft yang telah disusun tersebut dapat disepakati dan selanjutnya akan disampaikan ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dilakukan harmonisasi. Setelah proses harmonisasi di Baleg selesai, maka akan dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI.

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi Pengawasan Komisi V DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI mengenai Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, Hapsem BPK Semester I Tahun 2023, dan membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi Mudik Lebaran tahun 2024.

Komisi V juga melakukan Kunjungan kerja spesifik dan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN :

Rapat intern Komisi V DPR RI, yaitu : Rabu, 6 Maret 2024 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan IV Tahun 2023 – 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 13 Mei 2024.

A. FUNGSI LEGISLASI

1. Rapat dengan BKD, Rabu, 6 Maret 2024, dengan agenda Membahas Progress Report penyusunan NA dan Draft RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. RDPU dengan Ketua Umum *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA), Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), LAKSDA TNI (PURN) Soleman B. Ponto, S.T, SH, MH dan Prof. Dr. Capt. HM. Thamrin. MM, Rabu, 3 April 2024 dengan agenda menerima masukan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
3. Rapat Internal Komisi V DPR RI, Rabu, 3 April 2024 dengan agenda mengambil keputusan internal di tingkat Komisi mengenai RUU perubahan kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

B. FUNGSI PENGAWASAN

RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Rabu, 13 Maret 2024 dengan agenda membahas Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2023, dan lain-lain memutuskan :
 - a. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam APBN TA 2023:
 - 1) Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2023 sebagai berikut:

Kementerian	Realisasi Keuangan TA 2023	Realisasi Fisik TA 2023
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	98,13%	98,13%

- 2) Terhadap program/kegiatan di TA 2023 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2023, sehingga tidak terulang kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- b. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar pelaksanaan program dan kegiatan TA 2024 dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Selanjutnya terkait dengan kebijakan *Automatic Adjustment* TA 2024, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi untuk memastikan agar tidak mempengaruhi pencapaian output program prioritas TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

- c. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT dan Trasmigrasi atas capaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
 - d. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mendorong peningkatan kinerja Bumdes dan Desa Wisata dalam rangka pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa.
2. Rapat Kerja dengan Menteri PUPR, Senin, 1 April 2024, dengan agenda membahas Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2023, dan lain-lain memutuskan :
- a. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR dalam APBN TA 2023:
 - 1) Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2023 sebagai berikut:

Kementerian	Realisasi Keuangan TA 2023	Realisasi Fisik TA 2023
Kementerian PUPR	95,90 %	97,11 %

- 2) Terhadap program/kegiatan di TA 2023 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2023, sehingga tidak terulang kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- b. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dan tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
 - c. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk:
 - 1) mempercepat realisasi program dan kegiatan TA 2024, utamanya program infrastruktur berbasis masyarakat;
 - 2) meningkatkan alokasi untuk percepatan penanganan jalan daerah; dan
 - 3) memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Selasa, 2 April 2024, dengan agenda membahas Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2023, dan lain-lain memutuskan :
 - a. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN TA 2023:

- 1) Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2023 sebagai berikut:

Kementerian	Realisasi Keuangan TA 2023	Realisasi Fisik TA 2023
Kementerian Perhubungan	95,50 %	98,35 %

- 2) Terhadap program/kegiatan di TA 2023 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2023, sehingga tidak terulang kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- b. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar mempercepat realisasi program dan kegiatan TA 2024 dengan mengedepankan aspek transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya terkait dengan kebijakan *Automatic Adjustment* TA 2024, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memastikan agar pelaksanaannya tidak mempengaruhi rencana capaian output program prioritas TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
- c. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas capaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dan tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
- d. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan antara lain untuk:
 - 1) memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di semua subsektor perhubungan;
 - 2) mengoptimalkan pemanfaatan terminal tipe A, bandara, pelabuhan, dan stasiun yang sudah terbangun;
 - 3) memperhatikan aspek kearifan lokal pada pembangunan bandara dan terminal baru;
 - 4) meningkatkan pemanfaatan dan pemeliharaan aset Kementerian Perhubungan.

4. Rapat Kerja dan RDP dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, Kakorlantas Polri dan *Stakeholders* Terkait, Selasa, 2 April 2024, dengan agenda Membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi Mudik Lebaran tahun 2024, memutuskan :

- a. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, BMKG, BNPP (Basarnas) dan Korlantas Polri serta operator transportasi dan Badan Usaha Jalan Tol untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral, termasuk dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Mudik dan Balik Lebaran Tahun 2024.
- b. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2024 untuk:
 - 1) memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda transportasi;
 - 2) melakukan upaya preventif untuk mengantisipasi kecelakaan pada perlintasan sebidang;
 - 3) meningkatkan pengawasan terhadap kenaikan harga tiket pada seluruh moda transportasi agar tidak melebihi Tarif Batas Atas;
 - 4) optimalisasi manajemen *delay* pesawat udara dan kapal;
 - 5) meningkatkan pelayanan dalam pengambilan dan pengecekan bagasi bawaan penumpang.
- c. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2024 untuk:
 - 1) mempercepat preservasi Jalan Nasional dan titik ruas Jalan Tol yang mengalami kerusakan;
 - 2) mengoptimalkan jaringan jalan penyangga untuk mengurai kemacetan pada jalur utama;
 - 3) meningkatkan kualitas dan kelengkapan fasilitas di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP);
 - 4) melakukan sosialisasi kebijakan diskon tarif tol kepada masyarakat.
- d. Komisi V DPR RI meminta Korlantas Polri untuk mengoptimalkan pengaturan dan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dan mengurai kemacetan pada simpul-simpul transportasi, ruas Jalan Tol dan non-Tol, serta jalur destinasi wisata.
- e. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk meningkatkan sosialisasi informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya, utamanya pada daerah yang rawan terjadi bencana.
- f. Komisi V DPR RI meminta BNPP/Basarnas untuk memastikan kesiapan personil, peralatan, dan sarana SAR sebagai upaya memaksimalkan *quick response time* dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat.
- g. Komisi V DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Korlantas Polri terkait dengan upaya mengatasi masalah *Over Dimension Over Load* (ODOL).

RAPAT DENGAR PENDAPAT

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (BASARNAS), Kamis, 14 Maret 2024, dengan membahas Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2023, dan lain-lain memutuskan :

a. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dalam APBN TA 2023:

1) Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2023 sebagai berikut:

No.	Lembaga	Realisasi Keuangan TA 2023	Realisasi Fisik TA 2023
1.	BMKG	95,38 %	96,60 %
2.	BNPP/Basarnas	92,49 %	97,00 %

2) Terhadap program/kegiatan di TA 2023 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP/Basarnas agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2023.

b. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP/Basarnas agar mempercepat realisasi program dan kegiatan TA 2024 dengan mengedepankan aspek transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya terkait dengan kebijakan *Automatic Adjustment* TA 2024, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP/Basarnas untuk memastikan agar tidak mempengaruhi pencapaian output program prioritas TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

c. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG dan BNPP/Basarnas atas capaian opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP/Basarnas untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

d. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk:

- 1) memperbanyak program sekolah lapang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas informasi cuaca, iklim dan gempa;
- 2) melakukan perawatan secara berkala sarana dan prasarana prakiraan cuaca dan iklim;
- 3) meningkatkan pemantauan terhadap anomali cuaca dan menyampaikan informasinya kepada masyarakat;
- 4) memperluas edukasi dan sosialisasi aplikasi resmi BMKG.

e. Komisi V DPR RI meminta BNPP/Basarnas untuk:

- 1) meningkatkan pembinaan dan pelatihan potensi SAR untuk mendukung penyelamatan dan evakuasi dalam operasi SAR;
- 2) melakukan perawatan secara berkala sarana dan prasarana SAR;
- 3) meningkatkan kesiapsiagaan utamanya di daerah rawan terjadi bencana;

- 4) mengajukan atau mengusulkan pergantian peralatan yang sudah tidak layak sesuai dengan kebutuhan Basarnas
- f. Komisi V DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran BNPP/Basarnas untuk pembangunan Balai Diklat SAR.

KUNJUNGAN KERJA

1. Kunjungan Kerja Spesifik

- a. Tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2024, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke :
 - Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang meninjau Kali Sabi;
 - Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta meninjau pembangunan tol Cikampek II Selatan;
 - Provinsi Jawa Barat, Parungpanjang Kab. Bogor Meninjau Jalan Daerah
- b. Tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2024, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke :
 - Provinsi Banten, Kota Serang meninjau Terminal Pakupatan
 - Provinsi Banten, Kota Tangerang meninjau Terminal Poris Plawad
 - Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor meninjau Terminal Baranangsiang
- c. Tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2024, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke :
 - Provinsi Lampung meninjau Bandara Raden Inten, Terminal Rajabasa dan Tol Bakaheuni – Lampung
 - Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang meninjau Bandara Ahmad Yani, Stasiun Kereta Api Tawang, Terminal Mangkang di Semarang.
 - Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota Madiun meninjau Pengelolaan Terminal Purboyo, Rusunawa.

2. Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses dalam rangka Persiapan Lebaran 1445 Hijriah/Tahun 2024, tanggal 5 s.d 9 April 2024 ke :

- a. Provinsi Banten (Meninjau Pelabuhan Merak dan Bandara Sokarno-Hatta);
- b. Provinsi Jawa Barat (Meninjau Tol Cikampek dan Stasiun KA Pasar Senin);
- c. Provinsi Sulawesi Selatan (Meninjau Tower AIRNAV dan Kantor BMKG Kota Makassar).

Jakarta, April 2024
Kabagset Komisi V DPR RI,

Nunik Prihatin Budiastuti, SH.
NIP. 19691202 199803 2 002